

**PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN
(PNPM-MP) TERHADAP KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
(STUDI KASUS MASYARAKAT DESA MODANG
KECAMATAN KUARO KABUPATEN PASER)**

Aditya Herlambang¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan PNPM Pedesaan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PNPM Pedesaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Modang, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi di Desa Modang tempat penelitian berlangsung. Adapun wawancara dilakukan mulai Ketua pengurus PNPM Kecamatan, kantor desa serta masyarakat Desa Modang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PNPM Pedesaan ini dianggap gagal dalam menciptakan program pemberdayaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakatnya, rata-rata masyarakat desa Modang masih berada pada tingkat keluarga sejahtera tahap I, yang mana masyarakat hanya mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PNPM ini antara lain; 1) kurangnya informasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bantuan kegiatan dalam PNPM Pedesaan, 2) Masyarakat merasa kesulitan dalam pengangsuran pinjaman dari program SPP sehingga menyebabkan kemacetan angsuran pada salah satu kelompok, 3) masyarakat kurang mengerti tentang potensi yang ada di desa Modang sehingga pengambilan keputusan program kegiatan pembangunan menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, peran dan fungsi dari pemerintah daerah dan BKM/LKM (Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat) sebagai pelaksana program sangatlah penting dalam pelaksanaan PNMP Pedesaan.

Kata Kunci: *PNPM Mandiri Pedesaan, Pemberdayaan, Kesejahteraan.*

Pendahuluan

Penanganan permasalahan kemiskinan yang selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan, dimana kemiskinan bukan semakin berkurang, tetapi justru malah semakin bertambah. Maka mencermati dari situasi sosial tersebut

¹ Mahasiswa Program S1 Sosiatri-Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: aditya_herlambang@gmail.com

pemerintah mengeluarkan rencana melalui kebijaksanaan publik yang berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat, yaitu pemerintah membuat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Melalui program tersebut diharapkan pada gilirannya dapat tercipta kemandirian dan kesejahteraan masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan.

Rancangan program PNPM Mandiri dimulai dari perpres No. 54 tahun 2005 pada pasal 2 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). TKPK yang diketuai oleh menkokesra bertugas untuk merumuskan langkah-langkah kongkrit dalam penanggulangan kemiskinan. TKPK merumuskan sebuah program yang bernama PNPM dimana program tersebut sebagai tindak lanjut pemerintah untuk pembangunan bangsa Indonesia dalam menanggulangi kemiskinan dan tingkat pengangguran dengan program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat keseluruhan daerah di Indonesia untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan pekerjaan guna mengurangi pengangguran. Kemudian Presiden RI menyempurnakan nama PNPM menjadi PNPM-Mandiri. Salah satu langkah strategis pemerintah adalah melalui kegiatan Program Penanggulangan Kemiskinan yaitu PNPM-Mandiri.

PNPM-Mandiri sudah masuk di Desa Modang, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser sejak tahun 2011, dengan berbagai program yang telah direalisasikan untuk kesejahteraan masyarakat seperti pembangunan sarana air bersih untuk desa dan bantuan modal usaha bagi masyarakat. Tetapi pada tanggal 31 Desember 2014 program PNPM-Mandiri telah resmi berakhir, sebagaimana yang tertuang dalam dokumen berita, acara serah terima No: 100/1694/SJ dan No: 01/BA/M-DPDTT/IV/2015. Meskipun program PNPM telah berakhir namun jejak-jejak kelembagaan ekonomi yang ditinggalkan oleh program ini masih dapat dengan mudah kita jumpai ditengah-tengah masyarakat khususnya pedesaan, termasuk desa Modang, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser.

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Pemberdayaan

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk memperoleh daya atau kekuatan atau kemampuan, atau proses pemberian daya kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang belum berdaya. Pemberdayaan tidak boleh membuat masyarakat menjadi tergantung pada pemberian. Sesuatu yang dinikmati haruslah dari hasil usaha sendiri. Pemberdayaan mengandung arti bahwa seseorang berada dalam penegdalian diri sendiri atau lingkungan mereka, yang memperluas kemampuan dan wawasan mereka dan mengevaluasi diri sendiri sampai pada tingkat prestasi dan kemampuan yang lebih besar.

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut (Sumodiningrat, Gunawan, 2002:20);

- 1) Upaya itu harus terarah. Ini yang secara populer disebut pemihakan. Upaya ini ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya. Program ini langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu memiliki beberapa tujuan, yakni agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan dan kebutuhan mereka. Selain itu sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya.
- 2) Menggunakan pendekatan kelompok karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas jika penanganannya dilakukan secara individu. Pendekatan kelompok ini paling efektif dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien.

Sumodiningrat (dalam Sulistriyani, 2004:83) pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri dan kemudian lepas untuk mandiri meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi.

Dilihat dari Pendapat diatas berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar sehingga mencapai status mandiri dan tetap terarah. Meskipun demikian dalam rangka menjaga kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran.

Pemberdayaan Masyarakat

Edi Sedyawati (buku 1, 2007:184) pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat, seta unit kecilnya, yaitu keluarga, perlu diberdayakan dalam aspek ekonominya. Budimanta dan Rudito (2008:39) memasukkan konsep pemberdayaan masyarakat ini kedalam ruang lingkup Community Development. Pemberdayaan di sini diterjemahkan sebagai program-program yang berkaitan dengan upaya memperluas akses dan kapabilitas masyarakat untuk menunjang kemandiriannya. Menurut Kartasamita dalam LN Sumaryadi (2005:150) ada tiga strategi pendekatan yang dipakai dalam proses pemberdayaan masyarakat antara lain:

- 1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Kondisi ini didasarkan pada asumsi bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan.
- 2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana dan fasilitas yang dapat diakses oleh lapisan masyarakat yang paling bawah.
- 3) Memberdayakan rakyat dalam arti melindungi dan membela masyarakat lemah.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

Permasalahan kemiskinan sudah sangat mendesak khususnya di wilayah perkotaan yang membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan tekoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Program pengentasan kemiskinan telah lama dilaksanakan oleh pemerintah. Adapun beberapa program-program sektoral sektoral yang sudah dijalankan meliputi empat sektor antara lain sektor pertanian, industri, keuangan dan pedesaan. Tahun 1988-1994 pemerintah menjalankan program Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT) yang fokus kegiatannya pada ekonomi produktif dan sasaran berskala kecil. Pada periode 1994-1998 Pemerintah memperkenalkan program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang berkembang menjadi prasarana pengembangan desa tertinggal. Selanjutnya pada saat terjadi krisis moneter pemerintah membuat berbagai program pengentasan kemiskinan antara lain Padat Karya, Pemberdayaan Daerah Dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDMDKE) dan *Community Recovery Program*. Pada periode 1998-2005 program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat mulai dijalankan, antara lain PPK dan P2KP. Selanjutnya pada periode ini pemerintah membentuk komite penanggulangan kemiskinan untuk mempersiapkan strategi nasional penanggulangan kemiskinan dan menjadi bagian dari rencana pembangunan jangka menengah 2004-2009 yang perlu diterjemahkan rencana kerja tahunan pemerintah.

PNPM Mandiri adalah program nasional pengentasan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pengertian PNPM Mandiri yang terkandung sebagai berikut:

- 1) PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur progra, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

- 2) Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

Peningkatan Kesejahteraan

Menurut Sudarman Manim (1995:7) yang dimaksud tingkat kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan seseorang baik sosial material maupun spiritual yang disertai dengan rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin sehingga dapat memenuhi kebutuhan jasmaniah, rohaniyah, dan sosialnya.

Menurut Hidayat (1995:2) mengemukakan beberapa kriteria dilihat dari segi pencapaian tingkat kesejahteraannya, maka keluarga dapat dikelompokkan atas lima tahapan yaitu:

- 1) Keluarga Pra Sejahtera, yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara maksimal seperti kebutuhan pangan, sandang, dan papan.
- 2) Keluarga Sejahtera tahap I, yaitu keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara maksimal tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya.
- 3) Keluarga Sejahtera tahap II, yaitu keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya akan tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan perkembangannya.
- 4) Keluarga Sejahtera tahap III, yaitu keluarga yang dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan dasarnya, sosial psikologinya, dan perkembangannya namun belum dapat memberikan sumbangan (kontribusi) yang maksimal kepada masyarakat secara teratur, memberikan dalam bentuk material keuangan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan atau yayasan sosial keagamaan, kesenian, olahraga, pendidikan dan sebagainya.
- 5) Keluarga Sejahtera Plus III, yaitu Keluarga yang telah dapat memenuhi keseluruhan kebutuhannya, baik bersifat psikologis ataupun bersifat perkembangannya serta dapat pula memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi kehidupan dimana terpenuhinya kebutuhan hidup jasmani, rohani dan sosial dengan sebaik-baiknya bagi diri sendiri, keluarga maupun masyarakat serta bantuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

Pengertian Masyarakat

Menurut Syani (2002), ada beberapa unsur yang terkandung dalam istilah masyarakat, antara lain sebagai berikut :

- 1) Sejumlah manusia yang hidup bersama dalam waktu yang relatif lama, didalamnya manusia dapat saling mengerti dan merasa serta mempunyai harapan-harapan sebagai akibat dari hidup bersama itu. Terdapat sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat tersebut.
- 2) Manusia yang hidup bersama itu merupakan suatu kesatuan.
- 3) Manusia yang hidup bersama itu merupakan suatu sistem hidup bersama, yaitu hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan, oleh karenanya masyarakat merasa dirinya masing-masing terikat oleh kelompoknya.

Dalam bukunya Suharto (2005:47-48) mengemukakan bahwa tujuan mempelajari masyarakat adalah agar dapat melakukan penelitian mengenai masyarakat sehingga mampu memahami konteks dimana dimana kegiatan pemberdayaan masyarakat akan dilaksanakan, mengevaluasi sistem pelayanan kemanusiaan yang ada dan mengerti struktur pengambilan keputusan diwilayah yang ada tersebut. Masyarakat ada sekelompok orang yang memiliki perasaan yang sama atau menyatu satu sama lain karena mereka berbagi identitas, kepentingan-kepentingan yang sama, perasaan memiliki dan biasanya satu tempat yang sama.

Menurut Koentjaraningrat (2001:17) masyarakat adalah suatu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi melalui suatu sistem adat istiadat yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu identitas bersama. Mac Iver dan Page dalam Soekanto (2000:26) menyatakan bahwa masyarakat suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara dari wewenang dan kerjasama antar berbagai kelompok dan pengolahan dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan manusia. Sedangkan Soekanto (2000:26) masyarakat merupakan setiap kelompok yang telah hidup dan bekerja cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka suatu kesatuan sosial dengan batasan-batasan yang dirimuskan.

Masyarakat merupakan suatu objek sebagai kelompok lemah yang tidak berdaya yang perlu mendapatkan suatu perhatian untuk membentuk suatu masyarakat yang berdaya yang memiliki keterampilan, pengetahuan dan kemampuan, untuk itu perlunya kita mempelajari agar mengetahui serta mengetahui sebuah masyarakat.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu cara dengan jalan mengumpulkan bahan-bahan berupa kata-kata tertulis atau lisan dan bukan dari hipotesis yang berupa angka-angka. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Meleong 2001:3), metode kualitatif

adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah memaparkan sesuatu peristiwa baik yang berasal dari dokumentasi maupun wawancara yang berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati serta tidak menggunakan hipotesis.

Adapun fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-MP) di Desa Modang, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser meliputi :
 - a. Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP).
 - b. Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Modang.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-MP) di Desa Modang, Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser.

Hasil Penelitian

Pelaksanaan Program PNPM Mandiri Pedesaan

Proposal kegiatan merupakan persyaratan yang harus ada di dalam pengajuan bantuan kegiatan PNPM mandiri. Akan tetapi, prosedur pengajuan bantuan ini harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat dan lebih di prioritaskan kepada kelompok. Konsekuensi logisnya adalah dana bantuan kegiatan yang di ajukan tidak dengan mudah di cairkan dan kemungkinan yang lain adalah pengajuan proposal kegiatan itu bisa saja di tolak.

Adapun tahapan yang telah dilakukan dalam pelaksanaan program PNPM-MP di Desa Modang sebagai berikut :

1. Sosialisasi dan penyebaran informasi program. Baik secara langsung, melalui forum-forum pertemuan maupun melalui saluran informasi masyarakat.
2. Seleksi Prioritas Kegiatan. Masyarakat melakukan musyawarah untuk memutuskan usulan kegiatan prioritas yang akan didanai. Musyawarah ini terbuka bagi segenap anggota masyarakat untuk menghadiri dan memutuskan jenis kegiatan yang paling prioritas atau mendesak.
3. Masyarakat Melaksanakan Kegiatan Mereka. Dalam forum musyawarah, masyarakat memilih anggotanya sendiri untuk menjadi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di desa untuk mengelola kegiatan yang diusulkan dan mendapat prioritas pendanaan program. Fasilitator Teknis PNPM Mandiri Perdesaan akan mendampingi TPK dalam mendisain sarana prasarana, penganggaran kegiatan, verifikasi mutu dan supervisi. Para pekerja yang terlibat dalam pembangunan sarana prasarana tersebut berasal dari warga desa itu sendiri.
4. Akuntabilitas dan Laporan Perkembangan. Selama pelaksanaan kegiatan, TPK memberikan laporan perkembangan kegiatan minimal dua kali dalam

pertemuan terbuka desa, yakni sebelum program mencairkan dana tahap berikutnya dan pada pertemuan akhir, dimana TPK akan melakukan serah terima kegiatan kepada desa, serta badan operasional dan pemeliharaan kegiatan atau Tim Pengelola dan Pemelihara Prasarana (TP3).

PNPM Mandiri Pedesaan menyediakan dana langsung dari pusat (APBN) dan daerah (APBD) yang disalurkan ke rekening kolektif desa di kecamatan. Masyarakat desa dapat mempergunakan dana tersebut sebagai hibah untuk membangun sarana prasarana penunjang produktivitas desa, pinjaman bagi kelompok ekonomi untuk modal usaha bergulir, atau kegiatan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Setiap penyaluran dana yang turun ke masyarakat harus sesuai dengan dokumen yang dikirimkan ke pusat agar memudahkan penelusuran. Warga desa, dalam hal ini TPK atau staf Unit Pengelola Kegiatan (UPK) mendapatkan peningkatan kapasitas dalam pembukuan, manajemen data, pengarsipan dokumen dan pengelolaan dana secara umum, serta peningkatan kapasitas lainnya terkait upaya pembangunan manusia dan pengelolaan pembangunan wilayah pedesaan.

Program dan Kegiatan PNPM-MP di Desa Modang

Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Program simpan pinjam perempuan merupakan kegiatan pemberian modal untuk kelompok perempuan yang bertujuan untuk mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan ataupun sosial dasar. Program tersebut memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha serta mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan

Sasaran program ini adalah rumah tangga miskin yang produktif serta memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam perempuan yang sudah ada di masyarakat. Sedangkan bentuk kegiatan SPP adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan pinjaman.

Program SPP ini telah banyak membantu mengembangkan usaha ekonomi masyarakat terutama kaum ibu. SPP telah mendorong tumbuhnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) baik secara pribadi maupun kelompok. Perkembangan UMKM ini ditopang oleh perguliran kredit dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari PNPM Mandiri Pedesaan.

Proses Peminjaman Dana

Pada tahap ini calon peminjam yang bergabung dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) mengajukan permohonan pinjaman dana kepada

kantor kepala desa dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Adapun syarat-syarat dalam mengajukan permohonan pinjaman sebagai berikut:

1. Warga Desa Modang
2. Perempuan berusia minimal 20 tahun
3. Termasuk dalam kategori Rumah Tangga Miskin (RTM)
4. Memiliki usaha yang sudah berjalan maupun belum berjalan
5. Memiliki KTP/foto copy KTP
6. Memiliki Kartu Keluarga (KK)
7. Mengajukan permohonan dengan melampirkan proposal

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh ibu Ariani salah satu masyarakat, dalam wawancara dikatakan :

“Kalau untuk pendaftarannya kami membuat proposal dan melampirkan foto copy KTP dan foto copy KK dari setiap anggota kelompok...”
(wawancara, 12 Juni 2019).

Setelah peminjaman direalisasikan mekanisme pengawasan pun dilakukan. Pengawasan dilakukan dengan kunjungan ke rumah atau ke lokasi usaha peminjam secara berkala sesuai dengan kebutuhan. Maksudnya apabila peminjam telah memenuhi kebutuhan pinjaman dana bergulir dengan baik, maka kunjungan jarang dilakukan. Akan tetapi apabila peminjam menunjukkan gejala yang kurang baik/menyimpang maka frekuensi kunjungan akan ditingkatkan.

Dalam rangka menjalin hubungan baik antara petugas UPK dengan peminjam, minimal satu bulan setelah realisasi pinjaman, petugas UPK harus mengunjungi anggota KSM peminjam. Kunjungan selanjutnya tergantung pada kualitas pembayaran angsuran pinjaman yang dilakukan oleh peminjam.

Proses Pengembalian Dana

Adapun mekanisme pengembalian dana sebagai berikut :

1. Setelah menjelang satu bulan pinjaman, anggota KSM menyerahkan uang angsuran kepada ketua KSM untuk disetorkan pada UPK
2. Pengurus dan anggota KSM wajib saling mengingatkan kepada ketua KSM untuk melunasi angsuran pinjaman.
3. Setelah angsuran pinjaman serta tabungan terkumpul, kemudian disetor oleh ketua atau pengurus KSM kepada UPK dengan membawa kartu pinjaman KSM dan kartu tabungan.
4. Bila pengurus atau ketua KSM tidak menyetorkan angsuran kepada UPK maka dana tersebut tidak digulirkan lagi.
5. Bagi anggota yang tidak bisa membayar angsuran ketika sudah jatuh tempo maka tidak ada jaminan apapun bagi anggota tersebut.

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan ibu Ariani dalam wawancara, beliau mengatakan:

“...Untuk angsurannya setiap bulan kami mengumpulkan uangnya dulu dari setiap anggota kelompok sesuai dengan yang telah disepakati oleh kelompok untuk diserahkan ke pengurus di kecamatan. Biasanya setiap bulan ada petugasnya yang datang untuk menagih, tapi kadang saya sendiri yang menyerahkan ke kantor PNPMnya” (wawancara, 12 Juni 2019).

Pelaksanaan Program SPP

Program kegiatan SPP di desa Modang dilaksanakan dalam satu periode yang telah ditentukan. Dalam realisasinya, program SPP dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu tahapan Musyawarah Antar Desa (MAD), Musyawarah Desa (MUSDES), Musyawarah Khusus Perempuan (MKP), pengajuan proposal, tahapan verifikasi, MAD prioritas usulan, MAD penetapan usulan kemudian tahapan pencairan dana pinjaman.

Dana tersebut dicairkan ke beberapa kelompok, kemudian dana yang telah dicairkan oleh UPK tersebut wajib dikembalikan oleh masing-masing kelompok SPP kepada UPK dalam waktu 10 bulan, yang diangsur setiap bulan dengan bunga 1,5 persen dari jumlah pinjaman. Uang yang dikembalikan oleh kelompok SPP tersebut digulirkan kembali kepada kelompok-kelompok lain yang telah mengajukan proposal. Di desa Modang terdapat 3 kelompok yang memperoleh pinjaman SPP, masing-masing kelompok terdiri dari 5-10 orang anggota, tiap-tiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang ketua.

Dana yang dipinjamkan kepada masing-masing kelompok bervariasi mulai dari 1 juta sampai 2 juta tergantung kebutuhan anggota. Jumlah minimal pinjaman 1 juta sedangkan jumlah maksimal 2 juta, kemudian dana tersebut dimanfaatkan oleh anggota kelompok untuk membuka usaha seperti contoh kasus yang dilakukan oleh ibu Karjiyem yang memanfaatkannya untuk berdagang, dengan penghasilan kurang lebih Rp100.000 perhari. Dari besarnya pinjaman yang mereka pinjam, yaitu berkisar antara 1-2 juta rupiah, peneliti menemukan bahwa jumlah dana yang diterima tidak begitu banyak dan bermanfaat untuk meningkatkan ekonominya, seperti ibu Karjiyem, yang meminjam dana sebesar 2 juta untuk digunakan sebagai modal usaha berdagang. Dalam hal ini ibu Karjiyem memang dapat memiliki usaha namun bukan berarti ekonomi dan kesejahteraannya meningkat, dilihat dari pendapatan yang hanya berkisar kurang lebih Rp100.000 perhari dapat dikatakan masih belum mampu dalam memenuhi kebutuhannya. Selain itu angsuran yang harus dibayarkan setiap bulan dirasa menambah beban bagi masyarakat yang melakukan pinjaman dari program ini.

Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Modang

Berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan masyarakat untuk memutuskan usulan kegiatan prioritas yang akan didanai maka diputuskan

kegiatan berupa pembangunan/pembuatan sarana air bersih desa. Pembangunan sarana air bersih ini dibagi menjadi tiga tahap yaitu pembangunan bak penampungan air, pemasangan pipa air kerumah warga, dan pemasangan pompa air. Kegiatan ini sepenuhnya dikelola dan dilaksanakan langsung oleh masyarakat Desa Modang itu sendiri. Pembangunan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Modang dalam memenuhi kebutuhan air bersih, namun jika dilihat dari hasil yang telah dicapai, pembangunan infrastruktur ini dinilai kurang berhasil dari segi fungsi dan pemanfaatannya, hal ini dikarenakan masyarakat sebenarnya tidak terlalu membutuhkan sarana air bersih desa, sebab masyarakat sudah memiliki sumber air berupa sumur yang terdapat dimasing-masing rumah mereka. Kesalahan dalam pengambilan keputusan pembangunan infrastruktur ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang potensi yang dapat lebih dikembangkan untuk Desa Modang. Kesalahan tersebut berakibat terbengkalainya hasil pembangunan dari program ini.

PNPM, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Modang

Setiap Program yang dibuat oleh pemerintah pasti memiliki dampak terhadap masyarakat, begitupun dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan. Misalnya seperti program kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP). menurut pengakuan beberapa informan yang diwawancarai, bantuan SPP tersebut sangat membantu mereka dalam mengembangkan ekonomi rumah tangga. Seperti pernyataan dari ibu Kemen mengenai bantuan SPP, beliau mengatakan :

“Saya merasa terbantu dengan PNPM ini. Dengan adanya bantuan PNPM saya bisa mengembangkan usaha keripik tempe yang sudah lumayan lama saya jalankan” (wawancara, 12 Juni 2019).

Hal serupa dikatakan juga oleh ibu Karjiyem, beliau mengatakan :

“Saya merasa terbantu, kan kemarin saya pakai untuk membuka warung jadi lumayan ada pemasukan” (wawancara, 12 Juni 2019).

Dari penuturan masyarakat diatas maka, program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini dianggap berhasil dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Modang, hal tersebut tergambar pada poin berikut :

1. Adanya lapangan kerja baru
2. Memberikan pemasukan kepada masyarakat
3. Berkembangnya usaha masyarakat

Namun sekalipun masyarakat menganggap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) berhasil memberikan pinjaman usaha, nyatanya masyarakat juga mengalami kesulitan saat harus membayar angsuran pinjaman SPP.

Hal ini jelas bertentangan dengan tujuan-tujuan pemberdayaan masyarakat. Seperti yang kita tahu tujuan pemberdayaan yang utama, yakni menjadikan

masyarakat memiliki kuasa/kemampuan untuk lebih baik dari sebelumnya. Namun PNPM Mandiri Pedesaan justru memberikan beban berupa pinjaman pada masyarakat yang masih harus diangsur setiap bulannya.

Sedangkan dilihat dari tingkat kesejahteraannya, masyarakat Desa Modang masih berada pada posisi keluarga sejahtera tahap I, karena hanya mampu memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga dapat dikatakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) dinilai dapat membantu dalam mengembangkan ekonomi masyarakat namun belum dapat dikatakan berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kendala dalam Pelaksanaan PNPM-MP

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya informasi dan sosialisasi kepada masyarakat desa Modang tentang bantuan kegiatan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan.
2. Masyarakat merasa kesulitan dalam pengangsuran pinjaman dari program SPP sehingga menyebabkan kemacetan angsuran pada salah satu kelompok.
3. Masyarakat kurang mengerti tentang potensi yang ada di desa Modang sehingga pengambilan keputusan program pembangunan air bersih desa menjadi kurang efektif.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Pelaksanaan program kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Modang diputuskan melalui musyawarah desa. Dari hasil musyawarah desa tersebut diputuskan bahwa program yang dilaksanakan di Desa Modang adalah Simpan Pinjam Perempuan dan Pembangunan sarana air bersih desa.
2. Program dari PNPM Mandiri Pedesaan gagal dalam menciptakan program pemberdayaan masyarakat, hal ini dapat dinilai dari gagalnya program pembangunan sarana air bersih yang tidak sesuai dengan kebutuhan desa. Serta program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dirasa justru memberikan beban karena masyarakat masih harus membayar angsuran setiap bulannya, sementara pendapatan dari masyarakat kecil.
3. Kesejahteraan masyarakat berada pada tingkat keluarga sejahtera tahap I, karena masyarakat hanya mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.
4. Kendala dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di desa Modang sebagai berikut:

- a. Kurangnya informasi dan sosialisasi kepada masyarakat desa Modang tentang bantuan kegiatan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan.
- b. Masyarakat merasa kesulitan dalam pengangsuran pinjaman dari program SPP sehingga menyebabkan kemacetan angsuran pada salah satu kelompok.
- c. Masyarakat kurang mengerti tentang potensi yang ada di desa Modang sehingga pengambilan keputusan program pembangunan sarana air bersih desa menjadi kurang efektif.

Saran

1. Program pengentasan kemiskinan seharusnya lebih berorientasi kepada pemerataan pendapatan agar kesenjangan sosial tidak semakin timpang dan permasalahan kemiskinan tidak semakin rumit.
2. Masyarakat harus mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dasar di desanya sehingga program kegiatan dapat diambil sesuai dengan apa yang dibutuhkan di desa Modang.

Daftar Pustaka

- Abdul, Syani, 2002. *Sosiologi, Skematika, Teori dan Terapan*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Agustino, Leo, 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Budimanta, Arif dan Bambang Rudito, 2008. *Metode dan Teknik Pengelolaan Community Development*, Jakarta : Indonesia Center For Sustainable Development.
- Gunawan Sumodiningrat, 2002. *Sinkronisasi Program penanggulangan kemiskinan*, Lembaga pengabdian Masyarakat UGM.
- Moleong, J.Lexy, 2008. *Metode penelitian Kualitatif*, Bandung : PT.Remaja Rosda Karya.
- Sedyawati, Edi, 2007. *Keindonesiaan Dalam Budaya*, Jakarta : Wedatama Widya Sastra.
- Siagian, Sondang P, 2002. *Administrasi Pembangunan*, Jakarta : CV. Haji Masagung
- Sulistriyani, Ambar Teguh, 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Yogyakarta : Gava Media.
- Sumaryadi, I Nyoman, 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta : Citra Utama.
- Suharto, Edi, 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung : PT. Refika Aditama.

- Suyanto, Bagong dan Karnaji, 2005. *Kemiskinan dan kesenjangan soisal: ketika pembangunan tak berpihak kepada rakyat miskin*, Surabaya : Airlangga University, Press.
- Sudarman Danim 1995. *Transformasi Sumber daya Manusia: Analisis Fungsi Pendidikan Dinamika Perilaku dan Kesejahteraan Manusia Indonesia masa Depan*, Jakarta : Bumi Aksara.
- West, Richard dan Tuner, Lynn H, 2008. *Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi*, Jakarta : PT.Salemba Humanika, Hal. 339-349.